

SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN) DALAM PROSES PENCAIRAN DANA APBN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II

Yogi Prasetyo Nugroho^{1*}

Basuki²

Zaenal Fanani³

^{1,2,3}Universitas Airlangga

pippoinyoghi@gmail.com

Abstract

SPAN is a sub-program of the largest public financial reform program in Indonesia's history, called Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFM RAP). The disbursement process of APBN is one of the processes implemented by SPAN under the name of payment management. This research aims to identify problems related to the disbursement process of APBN funds in SPAN. This research uses descriptive qualitative method which was conducted within disbursement area of KPPN Jakarta II.

The results of data analysis indicate that there are various obstacles in the process of disbursement of APBN funds in the work unit in the payment area of KPPN Jakarta II. The things that are analyzed are the volume of disbursement APBN funds, the quality of disbursement APBN funds, and the business process of disbursement APBN funds which then is reduced to the formulation of the policy against the constraints and problems faced in the process of disbursement of funds in the State Budget at KPPN Jakarta II.

Keywords: *disbursement of funds, SPAN, work unit, Jakarta II*

JEL Classification : M41

Submission Date: Agustus 2017

Accepted Date: Januari 2018

**Corresponding Author*

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sejak bergulirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003, terjadi pada saat dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi.

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat dengan potensi pemanfaatannya yang sangat luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan Reformasi Manajemen Keuangan Negara (*Government Financial Management Reform*), langkah awal adalah dengan melakukan kerja sama dengan Bank Dunia melalui program *Government Financial Management and Revenue Administration Project* (GFMRAP). Tujuan program GFMRAP adalah untuk memperkuat efisiensi dan integritas dalam manajemen keuangan publik dan administrasi pendapatan, terutama melalui penguatan tatakelola, akuntabilitas dan transparansi (SPAN, 2012b).

SPAN merupakan sub-program dari program reformasi keuangan publik terbesar dalam sejarah di Indonesia yakni *Government Financial Management and Revenue Administration Project* (GFMRAP). Untuk Reformasi Sistem Manajemen Keuangan dalam konteks penerapan IFMIS (*Integrated Financial Management Information System*) yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara yang Terintegrasi, sehingga pengembangan SPAN merupakan langkah awal menuju implementasi IFMIS, pada tahap awal difokuskan pada reformasi penganggaran dan perbendaharaan negara (*Budget and Treasury Modernization*), kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dari sisi persiapan anggaran (*Budget Preparation*) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dari sisi pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban akuntansi (*Budget Execution and Responsibility Accounting*).

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) pada SPAN dapat memberikan dukungan pelayanan administrasi, serta untuk membantu pengambilan keputusan (Anwar, 2009). Menurut Baig dan Gururajan (2011), teknologi informasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan bisnis. Akuntansi sebagai bisnis, sistem bahasa dan informasi, harus menyesuaikan diri dengan teknologi baru yang akan disampaikan kepada pengguna laporan keuangan (Sarokolaei et al., 2012). Ismail dan Malcolm (2007), mengatakan perusahaan yang memiliki kecanggihan teknologi memiliki tingkat keselarasan Sistem Informasi Akuntansi yang baik dibandingkan dengan yang tidak menggunakan. Menurut Kusumastuti dan Irwandi (2012), dalam pengembangan sistem informasi para pemakai menjadi fokus penting berkaitan dengan keefektifan sistem informasi akuntansi.

Perubahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan Negara berdampak terhadap proses adaptasi satuan kerja (satker) dan para pengelola keuangan, baik ditingkat satker itu sendiri maupun KPPN. Munculnya berbagai peraturan yang baru terkait beberapa hal mengenai prosedur, aturan, dan sistem menyebabkan timbulnya perubahan yang harus diikuti. Perubahan yang secara cepat atau lambat, membuat seluruh pihak yang terlibat tetap harus dapat mengikutinya. Salah satu perubahan besar diakhir bergantinya sistem lama kepada SPAN yaitu terbitnya peraturan terkait pembaruan prosedur sistem yang lama. Salah satunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran APBN yang sudah menggunakan konversi dari sistem lama ke SPAN.

Pada sisi lain, SDM di tiap satker memiliki kompetensi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan banyak permasalahan dalam implementasi proses pencairan dana. Permasalahan yang timbul menyebabkan Satker harus datang lebih dari sekali dalam proses pencairan dana. Hal ini disebabkan, contohnya, kurangnya dokumen yang harus dilampirkan tiap mengajukan pencairan dana, kesalahan *input* dalam pembebanan

Analisis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Dalam Proses Pencairan Dana Apbn Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II

anggaran, kesalahan dalam penulisan uraian Surat Perintah Membayar (SPM), adanya *error* pada Arsip Data Komputer (ADK) dan permasalahan lain, meskipun rangkaian prosedur tersebut merupakan kegiatan yang berulang, baik mingguan maupun bulanan. Berdasarkan fenomena-fenomena dan bukti empiris yang telah dipaparkan diatas, memotivasi untuk meneliti tentang problematika yang muncul dalam implementasi SPAN terutama pada proses pelayanan pencairan dana di KPPN Jakarta II.

REVIU LITERATUR

Reviu literatur dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan SPAN dalam proses pencairan dana pada KPPN Jakarta II. Penelitian ini berdasarkan pada teori pengembangan sistem yang ada pada Sistem Informasi Akuntansi, konsep dan Pra Observasi yang telah dilakukan penulis lebih dulu untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada prosedur pencairan dana APBN dengan SPAN.

Pengembangan Sistem

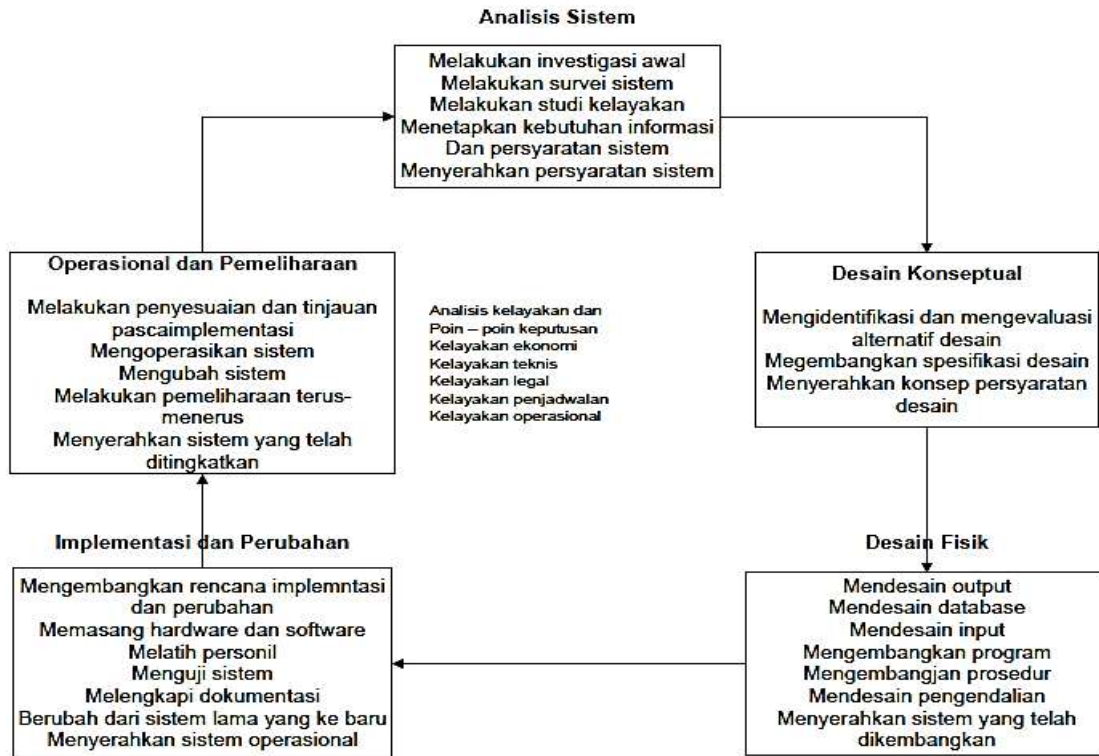
Teknologi informasi banyak membawa perubahan dalam organisasi dan proses bisnis. Teknologi informasi merupakan sebuah kebutuhan untuk organisasi yang membantu kinerja organisasi dan individu. Sistem informasi akan membantu organisasi agar dapat menyajikan laporan keuangan ke dalam sebuah bentuk informasi yang lebih akuntabel dan terpercaya, supaya sistem informasi akuntansi dapat digunakan banyak pihak dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai nilai lebih bagi suatu organisasi. Sistem informasi akuntansi adalah komponen dan elemen dari suatu organisasi yang menyediakan informasi bagi pengguna dengan pengolahan peristiwa keuangan (Zare, 2012). Sistem Informasi Akuntansi dianggap sebagai faktor penting dalam pencapaian kinerja yang lebih besar terutama dalam proses pengambilan keputusan (Al-eqab dan Adel, 2013).

Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan dari peralatan dan manusia (sumber daya) yang dibuat untuk mengubah data-data keuangan ke dalam bentuk yang bermanfaat bagi pengguna dan berguna bagi pemakainya (Bodnar & Hopwood, 2006). Menurut Kusumastuti dan Irwandi (2012), dalam pengembangan sistem informasi para pemakai menjadi fokus penting berkaitan dengan keefektifan sistem informasi akuntansi. Menurut Setiani (2008), melaksanakan pengembangan sistem informasi akuntansi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi perusahaan dan kepuasan pemakai sistem informasi tersebut. Kemudian, Romney dan Steinbart (2016) menyatakan bahwa siklus hidup pengembangan sistem merupakan proses yang ditempuh organisasi untuk memperoleh serta mengimplementasikan sistem informasi yang baru.

Sistem informasi akuntansi memiliki enam komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Keenam komponen tersebut (Romney & Steinbart, 2016) yaitu:

1. Orang yang menggunakan sistem.
2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.
3. Data tentang organisasi dan aktivitas bisnis.
4. *Software* yang digunakan untuk memproses data.

5. Infrastruktur teknologi informasi terdiri dari komputer, *peripheral devices*, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi.
6. Pengendalian internal dan keamanan untuk mengamankan data sistem informasi akuntansi.



Sumber : Romney dan Steinbart (2016)

Gambar 1
Siklus Hidup Pengembangan Sistem

Siklus hidup pengembangan sistem melalui beberapa tahap (Romney & Steinbart, 2016). Tahap pertama adalah analisis sistem. Dalam tahap ini dibutuhkan informasi untuk melakukan pembelian, pengembangan, dan modifikasi sistem. Tahap kedua adalah desain konseptual. Dalam tahap ini kebutuhan pengguna diidentifikasi dan dievaluasi melalui alternatif desain. Tahap ketiga, pengembang menerjemahkan rancangan konseptual ke dalam spesifikasi menggunakan kode dan uji program komputer, rancangan dokumen input dan output, membuat *file* dan *database*, mengembangkan prosedur, dan membangun pengendalian dalam sistem baru. Tahap ini disebut desain fisik. Tahap keempat adalah implementasi dan percakapan. Dalam tahap ini sistem mulai diterapkan. Standard dan pengendalian sistem baru dibangun, dokumentasi sistem telah lengkap. Tahap terakhir adalah tahap operasi dan pemeliharaan. Selama tahap ini, *review* dan modifikasi sistem dilakukan jika ada masalah yang timbul dari sistem baru.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder dan *indepth interview*, yaitu wawancara secara mendalam kepada para informan dengan menggunakan panduan wawancara sebagai instrumen penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) adalah program reformasi di bidang keuangan negara. SPAN mengintegrasikan proses bisnis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga ke pelaporan keuangan negara dalam satu aplikasi teknologi informasi dengan *database* yang terpusat. SPAN merupakan implementasi dari program Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara (RPPN) dan merupakan komponen terbesar dari program *Government Financial Management and Revenue Administration Project* (GFMRAP) yang menjadi pondasi untuk reformasi PFM (*Public Financial Management*) (SPAN, 2012a).

PMK Nomor 276 tahun 2008 tentang Program Reformasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara menyebutkan secara jelas tentang tujuan dilaksanakan program tersebut, yaitu :

1. Mengendalikan anggaran Negara, *asset*, dan kewajiban Pemerintah Pusat;
2. Menyediakan informasi yang komprehensif, dapat dipercaya, dan tepat waktu tentang keuangan pemerintah;
3. Memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan pemerintah.

Sasaran yang ingin dicapai meliputi:

- a. Otomasi proses operasional penganggaran dan pengelolaan kas, asset dan utang pemerintah;
- b. Peningkatan keandalan proses penganggaran dan pengelolaan kas, asset dan utang pemerintah;
- c. Peningkatan efisiensi layanan kepada kementerian Negara/lembaga, masyarakat dan perbankan;
- d. Peningkatan akuntabilitas melalui penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang lebih komprehensif, akurat dan tepat waktu;
- e. Penyediaan fasilitas rekonsiliasi yang andal, akurat, serta tepat waktu antara pemerintah dan perbankan;
- f. Penyediaan jejak audit (*audit trail*) untuk memfasilitasi proses audit akun pemerintah;
- g. Mengintegrasikan data pada berbagai subsistem manajemen keuangan pemerintah.

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai adalah:

1. Tersedianya sistem pengendalian alokasi dan pelaksanaan anggaran yang efektif;
2. Tersedianya sistem pengelolaan kas yang terpercaya;
3. Tersedianya sistem pelaporan manajerial tentang operasi keuangan pemerintah yang komprehensif, dapat diandalkan dan *realtime*;
4. Terwujudnya tahapan transisi penerapan sistem akuntansi dari berbasis kas ke berbasis akrual, dan;

5. Terlaksananya pelayanan kepada publik yang lebih efisien.

Dengan adanya kejelasan tujuan, sasaran dan manfaat dari pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan Negara melalui SPAN, diharapkan program SPAN menghasilkan *output* berupa system pengelolaan keuangan Negara yang bisa diimplementasikan demi terwujudnya pengelolaan keuangan Negara yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagaimana amanat Undang-Undang Keuangan Negara (SPAN, 2012b).

Pengelolaan keuangan Negara sampai saat ini masih mengalami beberapa kendala walaupun telah diotomatisasi menggunakan sistem untuk mempermudah dalam pelaksanaannya. Beberapa kondisi perbendaharaan yang terjadi saat ini diantaranya mengalami permasalahan dalam fungsi persiapan anggaran, manajemen DIPA, manajemen komitmen, manajemen pembayaran, permasalahan dalam pelaksanaan penerimaan Negara, manajemen kas, sistem akuntansi dan pelaporan yang belum sepenuhnya akrual, dukungan TI, dukungan SDM sehingga dibentuklah suatu sistem yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.

SPAN merupakan suatu sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas dan pelaporan ke dalam SPAN sampai dengan pelaporan kedalam satu sumber data yang terpusat sehingga dapat dihasilkan Laporan Keuangan Negara yang akuntabel, valid, stabil dan cepat (*real time*) (situs resmi SPAN diunduh tanggal 16 Juni 2016 jam 15.00).

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) merupakan system yang mengintegrasikan data dari siklus pengelolaan keuangan Negara (mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan) secara online yang akan membawa perubahan terhadap prosedur kerja, sistem aplikasi yang dipergunakan dan organisasi kearah yang lebih baik. Karakteristik SPAN dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Integrasi data
Data yang ada di SPAN merupakan satu-satunya data yang dipergunakan untuk berbagai kebutuhan. Data hanya dilakukan satu kali entry dan data yang terkumpul secara terpusat.
- b. Secara *Online*
Siapa pun yang memiliki akses terhadap data tersebut dapat mengambil data tersebut dari mana pun, asalkan bisa terhubung dengan internet.
- c. Perubahan prosedur kerja
Adanya penyempurnaan mekanisme kerja yang menyederhanakan proses bisnis yang ada.
- d. Perubahan sistem aplikasi
Adanya penyempurnaan sistem aplikasi dengan penggunaan aplikasi yang terintegrasi.
- e. Perubahan organisasi
Adanya penyempurnaan proses bisnis dan aplikasi, maka akan berdampak pada penyempurnaan organisasi, baik secara struktur maupun sumber daya manusia (SDM).

Volume Pencairan Dana APBN

Untuk mengetahui apakah pencairan dana APBN itu efektif atau tidak, indikator awal yang harus diketahui pada prosesnya adalah volume atau jumlah dokumen pencairan dana APBN yang dilakukan oleh KPPN Jakarta II. Agar dapat mengukur indikator tersebut, maka dijelaskan menjadi dua jenis, yaitu jumlah realisasi anggaran dan jumlah SP2D yang terbit. Pada tabel 4.1 dibawah ini akan ditunjukkan realisasi anggaran pada satker KPPN Jakarta II dengan mengacu pada tingkat realisasi belanja bulanan pada 3 tahun terakhir masa berjalannya SPAN.

Tabel 1
Persentase Realisasi Belanja Satker KPPN Jakarta II Periode
Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 (3 Tahun terakhir masa penerapan SPAN)

Bulan	T.A. 2014	Realisasi Perbulan	T.A. 2015	Realisasi Perbulan	T.A. 2016	Realisasi Perbulan
Januari	8.68		7.93		10.46	
Februari	14.98	6.3	14.56	6.63	15.84	5.38
Maret	20.79	5.81	25.58	11.02	22.98	7.14
April	31.95	11.16	33.62	8.04	31.90	8.92
Mei	40.70	8.75	39.10	5.48	38.65	6.75
Juni	50.25	9.55	48.25	9.15	46.90	8.25
Juli	55.74	5.49	56.25	8	54.10	7.2
Agustus	66.76	11.02	63.66	7.41	59.57	5.47
September	77.60	10.84	74.24	10.58	66.80	7.23
Oktober	83.76	6.16	79.77	5.53	74.56	7.76
November	89.84	6.08	86.60	6.83	83.30	8.74
Desember	97.01	7.17	92.66	6.06	91.31	8.01

Sumber : Data SPAN KPPN Jakarta II

Pada tabel 4.1. diatas terlihat penurunan terhadap realisasi anggaran dari T.A. 2014 sampai dengan T.A. 2016. Penurunan dari tahun ke tahun ini dapat menjadi preseden buruk bagi satuan kerja Kementerian/Lembaga, hal ini dapat disebabkan antara lain karena satuan kerja tidak melakukan perencanaan anggaran dengan baik sehingga penyerapan dana APBN yang seharusnya mencapai kurang lebih 100% hanya berkutat di level 91% pada T.A. 2016. Tapi dibalik hal negatif tersebut. Terselip satu hal positif yaitu tidak adanya lagi penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun yang biasanya terjadi pada masa sebelum SPAN (Pra SPAN).

Mutu Pencairan Dana APBN

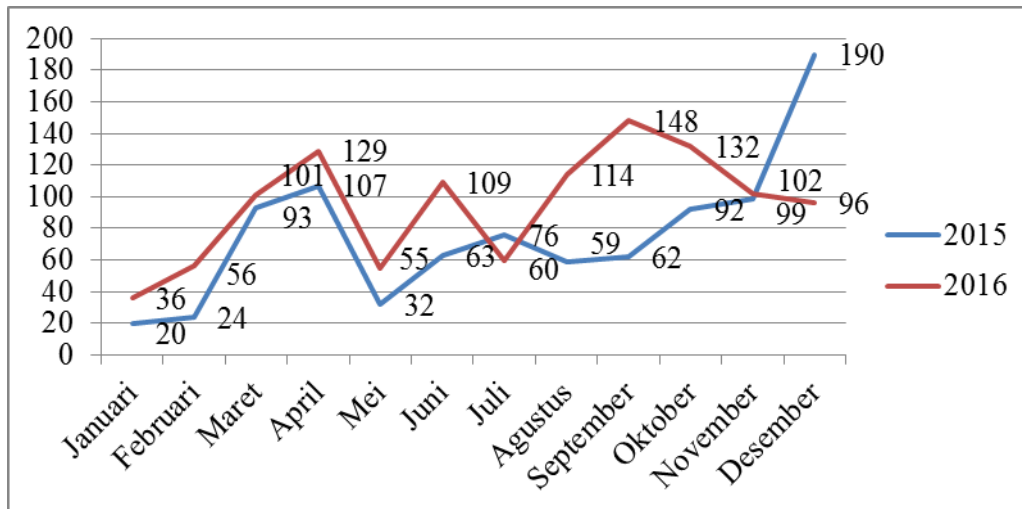
Dalam melihat mutu pada proses pencairan dana APBN, jumlah retur SP2D merupakan hal penting yang harus diperhatikan, karena apabila jumlah retur SP2D tinggi maka pencairan dana APBN menjadi semakin baik, demikian pula sebaliknya. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2014 tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana dalam rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara menyatakan bahwa retur SP2D merupakan penolakan atau pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan dana APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank/Kantor Pos Pengirim. Sebab terjadinya retur SP2D dapat dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu :

- a) Kesalahan atau perbedaan nama atau nomor rekening pada SP2D;
- b) Kesalahan pada penulisan nama bank penerima; dan
- c) Rekening tutup/pasif/tidak aktif.

Data retur dikatakan menjadi faktor penting dalam menilai mutu proses pencairan dana, karena jumlah retur SP2D dapat mencerminkan level dari pemeriksaan dan validasi terhadap data SPM dari satuan kerja yang dilakukan oleh SPAN, khususnya dalam hal validasi terhadap data supplier. Pada masa sebelum SPAN diterapkan, validasi atau pemeriksaan terhadap data supplier dilakukan dengan cara manual oleh petugas loket pencairan dana, dengan hanya melihat penulisan pada lampiran dokumen SPM yang menunjukkan nama penerima, rekening penerima, dan bank asal rekening penerima. Sedangkan pada SPAN data supplier divalidasi dengan mengikuti standar ketentuan dari pihak bank operasional, baik dalam penulisan nama maupun nomor rekening.

Data retur SP2D yang dikembalikan oleh pihak bank memungkinkan bahwa dalam satu nomor SP2D terdapat lebih dari satu retur SP2D yang terjadi karena jumlah penerima dana dalam SP2D tersebut ada lebih dari satu penerima, contohnya SP2D belanja pegawai maupun bansos yang memiliki banyak penerima dana dalam lampiran SPMnya. Dalam menjamin tingkat keakuratan dan validitas data retur SP2D, KPPN melakukan rekonsiliasi data retur SP2D dengan para satuan kerja yang menjadi mitra kerja KPPN Jakarta II. Rekonsiliasi tersebut diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per - 44/PB/2015 tentang Mekanisme Percepatan Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana. Adapun rekonsiliasi antara KPPN dengan satuan kerja yang memiliki retur SP2D dilaksanakan pada bulan Juli setiap tahunnya. Tabel dibawah menampilkan data retur SP2D periode T.A. 2015 dan T.A. 2016 yang merupakan 2 tahun terakhir masa penerapan SPAN.

Analisis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Dalam Proses Pencairan Dana Apbn Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II



Sumber : Data SPAN KPPN Jakarta II

Gambar 2
Grafik Jumlah Retur SP2D oleh Seksi Bank
Tahun Anggaran 2015 s.d. 2016

Berdasarkan grafik diatas, maka dapat terlihat bahwa pada masa dua tahun terakhir penerapan SPAN, jumlah retur SP2D yang ada terhitung masih tinggi. Pada dua tahun tersebut apabila dirata-rata maka jumlah retur setiap bulannya berkisar di angka 100 dengan nilai terendah yaitu 20 dan nilai tertinggi yaitu 190. Peningkatan yang terjadi pada bulan Desember 2016 diakibatkan oleh adanya pembayaran belanja bantuan sosial yang merupakan SP2D dengan banyak penerima rekening. Retur SP2D tersebut umumnya terjadi karena kesalahan penginputan nama atau nomor rekening yang dilakukan oleh petugas satker. Pembukaan rekening baru oleh penerima dana, rekening yang sudah lama tidak aktif, dan tergesa-gesanya satuan kerja dalam menyampaikan SPM ke KPPN karena adanya batas waktu penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran merupakan penyebab kesalahan yang umumnya terjadi.

Pada dasarnya, penyebab banyaknya retur SP2D adalah karena data *supplier* yang diinput kedalam SPM merupakan data yang berasal dari satuan kerja kepada KPPN pada saat pengajuan pendaftaran *supplier*. Data *supplier* seperti disampaikan sebelumnya, merupakan data yang berisi nama pemilik rekening, nomor rekening, dan nama bank pemilik rekening, pada saat pengajuan data *supplier* ke KPPN, data tersebut belum bisa divalidasi dan dicocokkan dengan bank pemilik rekening yang bersangkutan. Semestinya, retur SP2D bisa dikurangi atau dihilangkan, apabila SPAN melakukan kerjasama dengan pihak bank operasional dalam hal pengecekan *supplier*. Seperti dinyatakan oleh pegawai seksi bank :

“Ada mas..ini yang menurut aku paling utama ya kendalanya...jadi, aplikasi SPAN itu sampai sekarang belum bisa terhubung dengan aplikasi bank dalam memvalidasi nomor dan nama rekening. Sehingga data *supplier* yang dipakai adalah data yang diinput oleh Satker itu jadinya tanpa melalui validasi aplikasi dari kita.... Ini

membuat kesalahan input oleh satker dapat menyebabkan retur...apalagi kita tau sendiri kan mas, banyak satker yang nggak teliti kalau ngingin-ningin data SPM...”

Kendala lain dalam retur SP2D yang terjadi pada proses pencairan dana APBN adalah sistem kliring dari bank itu sendiri, bank akan menutup setiap transaksi pada pukul 15.00 tepat pada setiap harinya, hal ini menyebabkan SP2D yang terbit setelah pukul 15.00 akan ditransfer keesokan paginya ketika sistem bank sudah dibuka kembali. Permasalahan ini menyebabkan Direktorat PKN selaku pengelola kas Negara akan menganggap adanya retur terhadap SP2D yang diterbitkan setelah pukul 15.00 tersebut. Meskipun pada dasarnya tidak terjadi retur, tetapi hanya penundaan pencairan kepada rekening penerima SP2D oleh bank, retur ini hanya bersifat *temporary* sehingga kemungkinan besar tidak dianggap sebagai sesuatu yang menghambat proses pencairan dana SP2D. Akan tetapi hal ini menjadi bukti bahwa ada kesalahpahaman pada pengelolaan retur SP2D antara pihak KPPN dan pihak Direktorat PKN.

Permasalahan pada *supplier* diatas akhirnya merembet kepada waktu penyelesaian SP2D, ini terjadi pada proses pencairan dana APBN dari seksi pencairan dana ke seksi bank yang menyebabkan SP2D menjadi tidak dalam norma waktu 1 jam. Berikut ini merupakan kutipan wawancara dengan salah seorang pegawai seksi bank yang tidak mau disebutkan namanya:

“Yang paling sering muncul itu biasa terkait SOP mas, jadi KPPN itu kan dituntut menyelesaikan SP2D dalam 1 Jam dari mulai upload PMRT di FO Validator sampai dengan terbit SP2D. Tapi pada prosesnya, pada SOP itu pencetakan SPPT setelah di *approve* sama kasi PD seringkali terlambat sampai ke seksi Bank sehingga sering nggak sinkron antara data tagihan yang ada di SPAN dan SPPT tercetak yang disampaikan ke seksi bank.”

Dapat dikatakan juga, karena ketidak sinkronan data tagihan antara yang ada pada seksi Pencairan Dana dengan yang ada pada seksi Bank yang menyebabkan sulitnya norma penyelesaian SP2D dalam 1 jam, seperti disampaikan selanjutnya dalam kutipan berikut:

“Iya mas...jadi, karena SPPT terlambat itu...mengakibatkan petugas kami (seksi bank) kesulitan dalam memproses SPPT menjadi SP2D yang menyebabkan tak jarang kami harus nunggu SPPT tercetak sesuai tagihan yang sudah masuk di aplikasi SPAN. Hal itu membuat penyelesaian SP2D kebanyakan lebih dari 1 jam.”

Dengan demikian, berdasarkan analisis dapat dipastikan bahwa adanya keterlambatan pada penyampaian SPPT dari seksi Pencairan Dana ke seksi Bank berdampak pada adanya perbedaan antara data tagihan yang ada pada SPPT dan yang muncul pada aplikasi SPAN. Hal ini seharusnya tidak terjadi apabila SOP sudah berjalan sebagaimana mestinya dan apabila KPPN menginginkan norma 1 jam dalam penyelesaian SP2D dapat berjalan dengan baik.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil analisis dan penelitian yang lebih dalam maka dapat disimpulkan bahwa proses pencairan dana APBN pada KPPN Jakarta II, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut

1. Pencairan dana dengan SPAN menunjukkan adanya tren penurunan terhadap realisasi anggaran dari T.A. 2014 sampai dengan T.A. 2016. Penurunan dari tahun ke tahun ini dapat menjadi penilaian buruk bagi satuan kerja

Analisis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Dalam Proses Pencairan Dana Apbn Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II

Kementerian/Lembaga, penurunan realisasi ini terjadi antara lain karena satuan kerja tidak melakukan perencanaan anggaran dengan baik sehingga penyerapan dana APBN yang seharusnya mencapai kurang lebih 100% hanya berkutat di level 91% pada T.A. 2016. Namun dibalik hal negatif tersebut. Terselip satu hal positif yaitu tidak adanya lagi penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun yang biasanya terjadi pada masa sebelum SPAN (Pra SPAN), rata-rata penyerapan anggaran pada triwulan terakhir antara T.A. 2014 sampai dengan T.A. 2016 hanya berkisar pada level 5% sampai dengan 8%, dibandingkan dengan tahun anggaran terakhir masa sebelum SPAN yaitu T.A. 2012 dan T.A. 2013 yang pada bulan Desember 2012 terjadi penyerapan sebesar 17,71% dari total pagu APBN pada KPPN Jakarta II dan pada Desember 2013 sendiri yang terdapat realisasi belanja sebesar 12,38% (Data KPPN Jakarta II T.A. 2012 dan T.A. 2013).

2. Dalam analisis volume pencairan dana APBN selanjutnya, pada bulan Januari 2015 dan Januari 2016 jumlah SP2D yang terbit cenderung kecil, hal ini tidak sesuai dengan volume kerja normal dari KPPN Jakarta II yang merupakan salah satu KPPN Mega, yang jumlah SP2D yang terbit per hari nya pada waktu normal adalah sebanyak 200 lembar. Pada masa sebelum SPAN yaitu T.A. 2013 dibandingkan dengan masa SPAN yaitu T.A. 2015 dan 2016, pada triwulan terakhir maka tampak jelas bahwa SPAN terindikasi dapat melakukan efisiensi pada penerbitan SP2D. Hal ini terjadi karena SPAN dapat mengakomodir berbagai pengeluaran dengan akun yang sama menjadi satu tagihan SPM saja, berbeda dengan masa pra SPAN yang belum dapat mengakomodir hal tersebut.
3. Dalam melihat mutu pada pencairan dana APBN, retur SP2D merupakan hal penting yang harus diperhatikan, karena tingginya jumlah retur SP2D tinggi menjadi indikator baik buruknya proses pencairan dana APBN. Pada masa dua tahun terakhir penerapan SPAN, jumlah retur SP2D yang muncul masih tinggi, yang apabila dirata-rata maka jumlah retur setiap bulannya ada pada angka 100 dengan nilai terendah yaitu 20 dan nilai tertinggi yaitu 190. Peningkatan yang terjadi pada bulan Desember 2016 terjadi karena adanya pembayaran tagihan belanja bantuan sosial yang merupakan SP2D dengan banyak penerima rekening. Retur SP2D umumnya terjadi akibat kesalahan input nama atau nomor rekening yang dilakukan oleh petugas satuan kerja. Penyebab kesalahan yang umumnya terjadi adalah karena adanya pembukaan rekening baru oleh penerima dana, rekening penerima tagihan yang sudah lama tidak aktif, dan satuan kerja tidak teliti dalam menyampaikan SPM ke KPPN karena adanya batas waktu penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran.

Keterbatasan

Penggunaan metode kualitatif membuat penelitian ini banyak diwarnai oleh justifikasi dan subjektivitas periset. Meskipun demikian, periset sudah berusaha mengurangi bias, dengan menyiapkan instrumen kuesioner untuk mengarahkan diskusi dalam pengumpulan data.

Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dalam mengatasi permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan konsolidasi mengenai pembuatan payung hukum bagi kerjasama antara KPPN dengan BI dalam hal pemakaian data perbankan untuk transaksi dalam SPAN. Sehingga pada saat satker melakukan pendaftaran supplier, SPAN dapat langsung mengecek kebenaran data terkait informasi rekening, nama rekening dan nomor rekening yang ada pada *database* BI. Hal ini berguna untuk meminimalisir resiko retur SP2D. Karena, apabila terjadi retur SP2D akan mengakibatkan keterlambatan penerimaan tagihan APBN oleh penerima dana walaupun dalam hal penyerapan atau realisasi telah dibukukan oleh SPAN.
2. Pendelegasian wewenang yang diberikan kepada KPPN sebaiknya lebih luas seperti dalam hal perbaikan data baik *supplier* maupun kontrak yang tidak mengakibatkan pengeluaran Negara. Sehingga proses perbaikan terhadap tagihan berjalan lebih cepat dan efektif.
3. Untuk membuat dan merumuskan kebijakan selanjutnya dengan skala yang sebesar SPAN, seharusnya DJPB melibatkan akademisi dan satker dalam prosesnya dan lebih banyak melakukan analisis pra implementasi. Sehingga ketika kebijakan dengan kompleksitas permasalahan sebesar SPAN dijalankan nantinya dapat mengurangi kekurangan dan *defect* yang terjadi, baik pada peraturannya maupun pada sistemnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-eqab, M., & Adel, D. (2013). *The Impact of IT Sophistications on the Perceived Usefulness of Accounting Information Characteristics among Jordanian Listed Companies*. *Journal of Bussiness and Social Science*, 4 (3): 145-155.
- Anwar, S. N. (2009). Pengaruh Kematangan Teknologi Informasi dan Kinerja Sistem Informasi Terhadap Kemanfaatan Sistem Informasi Bagi Kelurahan-Kelurahan di Kodia Semarang. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank*, 14 (12): 146-151.
- Baig, A. H., & Gururajan, R. (2011). Preliminary Study to Investigation the Determinants that Effect IS/IT Outsourcing. *Journal of Information and Communication Technology Research*, 1 (2): 48-54.
- Basuki. (2016). *Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen Berbasis Studi Kasus*. Airlangga University Press.
- Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2006). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (2015). Retrieved 16 June, from <http://www.kppn-mataram.net/berita-170-apa-itu-span.html>
- Haris, A. (2015). Efektivitas Pencairan Dana APBN Dengan Penerapan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (SPAN). *Tesis*, Universitas Gadjah Mada.
- Herryanto, H. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ichsan, F. 2015. Pelayanan Pencairan Dana Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Studi Kasus Pada KPPN Sibolga. *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Analisis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Dalam Proses
Pencairan Dana Apbn Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II

- Ismail, N. A., & Malcolm, K. (2007). Factors Influencing The Alignment of Accounting Information Systems in Small and Medium Sized Malaysian Manufacturing Firms. *Journal of Information Systems and Small Business*, 1(1): 1-20.
- Kusumastuti, M. C., & Irwandi, S. A. (2012). Investigasi Empat Faktor Kontingensi Sebagai Variabel Moderating Terhadap Partisipasi Pemakai dan Kepuasan Pemakai Dalam Pengembangan Sistem Informasi. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi STIE Perbanas*, 2 (2): 139:150.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*: Andi Yogyakarta, Januari
- Muthohar, A. (2012). Faktor-Faktor Utama Yang Mempengaruhi Efektivitas Perencanaan Kas Pada Satuan Kerja-Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Dalam Lingkup Wilayah Pembayaran KPPN Jakarta II. *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Noordiawan, D. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Cahaya Pustaka.
- Putra, D. M. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Terhadap Penerimaan Dan Penggunaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Dengan Pendekatan *Technology Acceptance Model*. *Jurnal Akuntansi Universitas Mercu Buana*.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 276 tahun 2008 tentang Program Reformasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.
- Republik Indonesia. (2014a). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2014 tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana dalam rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*.
- Republik Indonesia. (2014b). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 tahun 2014 Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*.
- Republik Indonesia. (2015a). *Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara*.
- Republik Indonesia. (2015b). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per - 44/PB/2015 tentang Mekanisme Percepatan Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana*.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sarokolaei, M. A., Bishak, M. J., Rahimipoor, A., & Sahabi, E. (2012). The Effect of Information on Efficacy of the Information of Accounting System. *Journal International Conference on Economics, Trade and Development*, 36 (32): 174-177.
- Setiani, K. O. (2008). Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak dan Partisipasi Pengguna Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. Telekomunikasi Tbk. di Surabaya. *Tesis*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas: Surabaya.

- SPAN. (2012a). *Apa itu SPAN? : Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.*
- SPAN. (2012b). *Modul SPAN Manajerial: Direktorat Transformasi Perbendaharaan.*
- Zare, I. (2012). Study of Effect of Accounting Information System and Softwares on Qualitative Features of Accounting Information. *Journal of Management Science and Business Research*, 1 (4), pp: 1-12.